Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 26833-26840
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Evaluasi Kualitas Pelayanan Halte SMPN 5 Karawang di Kabupaten Karawang

Ekhty Putri Anggraini[1], Riyan Suganda[2], Hasna Nurhanifah[3], R. Caesario Boing Rachmat Raharjo[4]
Program Studi Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknk Transportasi Darat Indonesia-STTD
[1]anggiputriekthy@gmail.com, [2]nurhanifahhasna.hn@gmail.com , [3]sugandariyan00@gmail.com,
[4]caesario.boing@ptdisttd.ac.id

Abstrak

A bus stop (halte) is one of the essential supporting facilities for public transportation and plays a critical role in sustaining community mobility, particularly among students, in areas experiencing high mobility pressure such as Karawang Regency, an area widely recognized as a major industrial zone in West Java. One example of such a facility is the SMPN 5 Karawang bus stop, which functions as a primary access point for students, educators, and surrounding residents. This study aims to evaluate the service quality of the SMPN 5 Karawang bus stop by assessing the suitability of its existing physical facilities against the Minimum Service Standard (Standar Pelayanan Minimum/SPM) established under Decree of the Directorate General of Land Transportation Number 271/HK.105/DRJD/96, and to identify which service attributes require priority improvement. A descriptive qualitative and quantitative approach was employed, combining direct field observation, standardized facility inventory forms, systematic photographic documentation, and interviews with users and bus stop managers, complemented by secondary data obtained from relevant regional agencies. Facility fulfillment levels were calculated using a percentage-based compliance formula applied separately to mandatory (primary) and supplementary facility categories. The results indicate that of the ten facility items assessed, only the identity signage was available, albeit in a deteriorated condition, while the protective canopy was present but structurally unfit for use; the remaining eight items, including seating, route information boards, and lighting, were entirely absent. The overall compliance rate reached only 10 percent, with primary facilities at 16.7 percent and supplementary facilities at 0 percent, indicating that the bus stop has not yet met minimum service expectations and requires facility rehabilitation as the top improvement priority. This study is expected to inform local government policy for improving bus stop infrastructure and student transportation safety.

Keywords: *Service Quality,Minimum Service Standars (SPM), Facility Compliance, Student Transportation, SMPN 5 Karawang*

1. Latar Belakang

Transportasi umum memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, termasuk pelajar khususnya di kawasan-kawasan dengan tekanan mobilitas tinggi seperti Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai kawasan industri besar. Kebutuhan akan sistem transportasi publik yang terencana dengan baik menuntut ketersediaan infrastruktur pendukung yang layak, salah satunya adalah halte. Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, Halte SMPN 5 Karawang dihadirkan di kawasan pendidikan untuk memudahkan akses pelajar, tenaga pendidik, dan warga sekitar. Halte bukan sekadar titik tunggu, melainkan ruang interaksi pertama antara penumpang dan sistem angkutan umum, sehingga kelengkapan fasilitas, kondisi bangunan, serta rasa aman dan nyaman yang ditawarkan akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan transportasi secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menuntut adanya pengkajian berkala terhadap kondisi fisik dan tata ruang halte melalui inventarisasi fasilitas eksisting, seperti tempat duduk, papan informasi trayek, pencahayaan, pelindung cuaca, dan fasilitas disabilitas, serta evaluasi kesesuaiannya dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai tolok ukur keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan inklusivitas. Berbagai penelitian pada halte dan perhentian angkutan umum di kota-kota lain menunjukkan pola yang serupa, yaitu tingkat pemenuhan fasilitas terhadap SPM yang masih rendah dan menjadi sumber ketidakpuasan pengguna [1], [2]. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik mengevaluasi kesesuaian kondisi eksisting Halte SMPN 5 Karawang dengan SPM masih sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi fasilitas Halte SMPN 5 Karawang secara menyeluruh guna mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.

Permasalahan minimnya pemenuhan fasilitas halte terhadap SPM sesungguhnya bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan pola pengelolaan angkutan umum secara keseluruhan, mulai dari kondisi armada, kepastian jadwal, hingga integrasi antarmoda [6], [7]. Ketika halte sebagai simpul pelayanan pertama

tidak dikelola dengan baik, maka citra dan daya tarik transportasi umum secara umum turut menurun, sehingga masyarakat cenderung beralih ke kendaraan pribadi. Hal ini menjadi semakin krusial pada lokasi-lokasi yang berdekatan dengan fasilitas pendidikan, mengingat pelajar merupakan kelompok pengguna yang rentan dan sangat bergantung pada ketersediaan angkutan umum untuk mobilitas hariannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan standar fasilitas halte agar layanan angkutan umum di Kabupaten Karawang semakin nyaman, aman, dan berdampak positif bagi masyarakat luas..

2. Metode Penelitian

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi eksisting fasilitas Halte SMPN 5 Karawang melalui observasi langsung di lapangan, kemudian membandingkannya dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku untuk menentukan tingkat kesesuaian dan kelengkapan fasilitas. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi fisik, tata letak, dan permasalahan yang ditemukan di lapangan, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung persentase tingkat pemenuhan fasilitas terhadap standar yang berlaku.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah Halte SMPN 5 Karawang yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan status jalan lokal sekunder tipe 4/2 T (empat lajur dua arah terbagi). Pengambilan data lapangan dilaksanakan pada tahun 2026.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, BAPPEDA Kabupaten Karawang, BPS Kabupaten Karawang, DPUPR Kabupaten Karawang, dan Kementerian Perhubungan. Data primer dikumpulkan melalui: (1) survei inventarisasi halte menggunakan formulir terstandar; (2) dokumentasi foto sistematis dari berbagai sudut pandang; dan (3) wawancara kepada pengguna dan pengelola halte.

2.4. Indikator Penelitian

Data hasil survei diolah dan dianalisis berdasarkan indikator kualitas pelayanan halte pada Tabel 1 yang meliputi:

Tabel 1 Indikator Kualitas Pelayanan Halte

Variabel	Indikator	Satuan
Kualtias Pelayanan Halte	Kesesuaian Fasilitas Utama	%
	Kesesuaian Fasilitas Tambahan	%
	Tingkat Pemenuhan SPM Keseluruhan	%

2.5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui lima tahap, yaitu: (1) analisis kondisi eksisting untuk mendeskripsikan kondisi aktual halte; (2) analisis kesesuaian fasilitas eksisting dengan SPM menggunakan matriks perbandingan; (3) analisis tingkat kelengkapan fasilitas dengan menghitung persentase pemenuhan; (4) penyusunan desain usulan berdasarkan hasil analisis dan standar teknis yang berlaku; dan (5) kajian dampak keberadaan halte yang layak pakai terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna. Tingkat pemenuhan fasilitas (Pf) dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Pf = \frac{Jumlah\ Fasilitas\ Sesuai\ Standar}{Total\ Fasilitas\ Dinilai}\ x\ 100\% \qquad (1)$$

Pf adalah persentase pemenuhan fasilitas (%), Jumlah Fasilitas Sesuai Standar adalah banyaknya item fasilitas yang tersedia dan dalam kondisi layak sesuai SPM, dan Total Fasilitas yang Dinilai adalah keseluruhan item fasilitas utama maupun tambahan yang dievaluasi.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13209
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil survei inventarisasi dan analisis kesesuaian yang dilakukan terhadap Halte SMPN 5 Karawang, diperoleh gambaran kondisi pelayanan sebagai berikut.

3.1 Kondisi Eksisting Halte SMPN 5 Karawang

Kondisi eksisting Halte SMPN 5 Karawang hasil survei lapangan ditampilkan pada Gambar 1 berikut.



Sumber : Survei lapangan, 2026

Gambar 1 Kondisi Eksisting Halte SMPN 5 Karawang

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan, Halte SMPN 5 Karawang memiliki dimensi panjang 6,44 meter, lebar 2,4 meter, dan tinggi 3 meter, dengan struktur konstruksi beton dan besi beratap kanopi. Kondisi fisik halte saat ini telah mengalami penurunan kualitas, ditandai dengan cat yang pudar dan kusam, komponen besi yang berkarat, serta banyaknya coretan pada dinding. Dimensi halte juga tergolong kecil untuk menampung volume pengguna pada jam-jam sibuk, dan belum tersedia jalur difabel maupun papan informasi trayek. Kondisi ini sejalan dengan temuan pada evaluasi halte di berbagai kota lain yang juga menunjukkan penurunan kualitas fisik bangunan serta minimnya perhatian terhadap kebutuhan aksesibilitas pengguna berkebutuhan khusus [1], [2].

Penurunan kualitas fisik tersebut mengindikasikan belum adanya program pemeliharaan rutin dan berkala terhadap aset infrastruktur halte oleh instansi pengelola. Cat yang pudar dan komponen besi yang berkarat menunjukkan bahwa halte tersebut kemungkinan besar tidak pernah mengalami perawatan sejak pertama kali dibangun, sementara banyaknya coretan pada dinding mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap aset publik di kawasan tersebut. Dimensi halte yang kecil juga menjadi persoalan tersendiri, mengingat SMPN 5 Karawang memiliki jumlah siswa yang cukup besar sehingga pada jam-jam sibuk, khususnya saat masuk dan pulang sekolah, kapasitas tampung halte tidak akan mencukupi dan berpotensi mendorong siswa menunggu di luar area halte, termasuk di bahu jalan yang berbahaya bagi keselamatan. Ketiadaan jalur difabel dan papan informasi trayek turut menegaskan bahwa aspek inklusivitas dan kemudahan akses informasi belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan awal halte ini, sebagaimana juga ditemukan pada evaluasi implementasi standar pelayanan angkutan umum berbasis pemenuhan hak pengguna di lokasi lain [11].

3.2 Karakteristik Trayek yang Melintasi Halte

Halte SMPN 5 Karawang terletak tepat di depan SMP Negeri 5 Karawang yang memiliki 1.294 siswa dan sering digunakan untuk naik-turun angkutan umum. Berdasarkan SK Bupati Karawang Nomor 551.21/Kep.510-Huk/2009 tentang Jaringan Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Karawang, terdapat 9 trayek yang memiliki rute melalui Jalan Jenderal Ahmad Yani, namun kondisi di lapangan hanya 4 trayek yang masih beroperasi, yaitu Trayek 01, 07, 17, dan 63. Seluruh trayek dilayani oleh kendaraan jenis Mobil Penumpang Umum (MPU) merek Carry berkapasitas 10 penumpang dengan status kepemilikan swasta/perorangan. Karakteristik operasional keempat trayek tersebut dirangkum pada Tabel 2 berikut.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13209
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 2 Karakteristik Trayek yang Melintasi Halte SMPN 5 Karawang

Trayek	Panjang Rute (km)	Jumlah Armada Berizin (unit)	Usia Kendaraan Rata-rata (tahun)	Tarif Umum (Rp)	Tarif Pelajar (Rp)	Jam Operasi (jam/hari)
01	13	42	24	6.000	3.500	16
07	10	100	25	6.000	3.500	10
17	10	100	23	10.000	5.000	14
63	12	40	27	6.000	3.500	15

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Keseluruhan trayek beroperasi tanpa sistem jadwal tetap, di mana keberangkatan kendaraan menyesuaikan ketersediaan penumpang. Pelajar memperoleh tarif khusus yang lebih rendah dibandingkan tarif umum pada seluruh trayek, namun usia armada yang beroperasi rata-rata sudah melebihi 20 tahun, yang berpotensi memengaruhi keandalan dan kenyamanan layanan bagi pengguna halte, termasuk pelajar SMPN 5 Karawang.

3.3 Standar Fasilitas Halte Berdasarkan SPM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96, fasilitas halte terbagi menjadi fasilitas utama (wajib) dan fasilitas tambahan, sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Standar Fasilitas Halte Berdasarkan SPM

No.	Jenis Fasilitas	Kategori	Keterangan
1	Identitas Halte (Nama/Nomor)	Utama (Wajib)	Papan nama dengan tulisan jelas dan terbaca
2	Rambu Petunjuk Utama	Utama (Wajib)	Petunjuk arah dan informasi rute
3	Papan Informasi Trayek Utama	Utama (Wajib)	Informasi rute, tujuan, dan jadwal
4	Lampu Penerangan	Utama (Wajib)	Penerangan yang cukup untuk keamanan
5	Tempat Duduk	Utama (Wajib)	Tersedia untuk calon penumpang
6	Kanopi/Atap Pelindung	Utama (Wajib)	Pelindung dari hujan dan sinar matahari
7	Telepon Umum	Tambahan	Disediakan bila diperlukan
8	Tempat Sampah	Tambahan	Mendukung kebersihan lingkungan
9	Pagar Pembatas	Tambahan	Keamanan dan keteraturan penumpang
10	Papan Iklan/Pengumuman	Tambahan	Informasi publik tambahan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13209
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sumber : SK Dirjen Perhubungan Darat No. 271/HK.105/DRJD/96

3.4 Hasil Inventarisasi Fasilitas Halte

Hasil inventarisasi fasilitas Halte SMPN 5 Karawang berdasarkan survei lapangan tahun 2026 disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Hasil Inventarisasi Fasilitas Halte SMPN 5 Karawang

No.	Jenis Fasilitas	Ketersediaan	Kondisi
1	Identitas Halte (Nama/Nomor)	Ada	Terbaca namun rusak
2	Rambu Petunjuk Utama	Tidak Ada	-
3	Papan Informasi Trayek Utama	Tidak Ada	-
4	Lampu Penerangan	Tidak Ada	-
5	Tempat Duduk	Tidak Ada	-
6	Kanopi/Atap Pelindung	Ada	Tidak Layak/Rusak
7	Telepon Umum	Tidak Ada	-
8	Tempat Sampah	Tidak Ada	-
9	Pagar Pembatas	Tidak Ada	-
10	Papan Iklan/Pengumuman	Tidak Ada	-

Sumber : Hasil Analisis, 2026

3.5 Analisis Kesesuaian Fasilitas dengan SPM

Analisis kesesuaian dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting terhadap standar SPM. Hasil analisis disajikan pada matriks kesesuaian pada Taabel 5 berikut.

Tabel 5 Matriks Kesesuaian Fasilitas Halte dengan SPM

No.	Fasilitas	Kategori	Standar SPM	Kondisi Eksisting	Status	Keterangan
1	Identitas Halte	Utama	Ada, terbaca	Ada, terbaca	Kurang sesuai	Perlu perbaikan
2	Rambu Petunjuk	Utama	Ada	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
3	Papan Info Trayek	Utama	Ada	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13209
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

No.	Fasilitas	Kategori	Standar SPM	Kondisi Eksisting	Status	Keterangan
4	Lampu Penerangan	Utama	Ada, berfungsi	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
5	Tempat Duduk	Utama	Ada, layak	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
6	Kanopi/Atap	Utama	Ada, layak	Ada, tdk layak	Kurang sesuai	Perlu perbaikan
7	Telepon Umum	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
8	Tempat Sampah	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
9	Pagar Pembatas	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada
10	Papan Iklan	Tambahan	Opsional	Tidak Ada	Perlu ada	Disarankan ada

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Dari 6 fasilitas utama yang bersifat wajib, hanya identitas halte yang tersedia meski dalam kondisi kurang sesuai, sementara rambu petunjuk, papan informasi trayek, lampu penerangan, dan tempat duduk sama sekali tidak tersedia. Kanopi/atap pelindung tersedia namun dalam kondisi tidak layak. Seluruh fasilitas tambahan (telepon umum, tempat sampah, pagar pembatas, dan papan iklan/pengumuman) juga tidak tersedia. Minimnya fasilitas tambahan semacam ini juga banyak ditemukan pada evaluasi perhentian angkutan umum perkotaan di daerah lain, yang mengindikasikan bahwa persoalan ini bersifat umum dan bukan hanya terjadi pada satu lokasi [9], [12].

3.6 Penilaian Tingkat Kelengkapan Fasilitas

Berdasarkan analisis kesesuaian, dilakukan penilaian terhadap tingkat pemenuhan fasilitas utama dan tambahan menggunakan persamaan (1), dengan hasil sebagaimana Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Fasilitas

No.	Kategori Fasilitas	Total Item	Kesesuaian SPM	Ketidaksesuaian SPM	Persentase Pemenuhan
1	Fasilitas Utama	6	1	5	16,7%
2	Fasilitas Tambahan	4	-	4	0%
	Total	10	1	9	10%

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Tingkat pemenuhan fasilitas utama hanya mencapai 16,7% dan fasilitas tambahan 0%, sehingga persentase pemenuhan keseluruhan terhadap SPM hanya sebesar 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Halte SMPN 5 Karawang belum memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pengelola, mengingat rendahnya pemenuhan SPM berdampak langsung pada kenyamanan dan minat masyarakat, khususnya pelajar, dalam menggunakan transportasi publik. Rendahnya tingkat pemenuhan ini konsisten dengan hasil evaluasi pelayanan angkutan umum lainnya, yang juga menunjukkan bahwa sejumlah aspek pelayanan seperti ketersediaan informasi dan fasilitas di halte masih berada di bawah standar yang ditetapkan [13], [15].

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13209
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.7 Desain Usulan Halte

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting dan evaluasi SPM, dirumuskan desain usulan peningkatan fasilitas Halte SMPN 5 Karawang dengan konsep modern menggunakan material tahan lama berupa kombinasi baja, kayu, dan kaca untuk tampilan yang estetis namun tetap fungsional, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas dan keberlanjutan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.



Usulan Desain Tampak Atas



Usulan Desain Tampak Depan



Usulan Desain Tampak Dalam



Usulan Desain Tampak Samping

Gambar 2 Desain Usulan Halte SMPN 5 Karawang

3.8 Dampak Halte yang Layak Pakai di Dekat Sekolah

Keberadaan halte yang layak pakai di sekitar lingkungan sekolah bukan sekadar fasilitas pelengkap jalan, melainkan bagian penting dari upaya menciptakan sistem transportasi yang aman bagi anak-anak sebagai pengguna jalan. Ribuan siswa bergantung pada angkutan umum untuk berangkat dan pulang sekolah setiap harinya; tanpa halte yang memadai, mereka terpaksa menunggu di bahu jalan atau menyeberang di sembarang titik.

Ketika halte dibangun dengan standar yang layak, dampaknya terasa pada beberapa aspek: dari sisi keselamatan, risiko kecelakaan lalu lintas di sekitar sekolah dapat ditekan karena siswa memiliki titik naik-turun yang jelas; dari sisi ketertiban lalu lintas, kendaraan penjemput maupun angkutan umum tidak lagi berhenti sembarangan di depan gerbang sekolah sehingga kemacetan pada jam masuk dan pulang sekolah dapat berkurang; dan dari sisi sosial, halte yang nyaman mendorong siswa dan orang tua untuk lebih memilih transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Pembangunan halte yang layak di dekat sekolah juga merupakan wujud pemenuhan hak anak atas rasa aman dalam perjalanan menuju dan dari tempat belajarnya. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penyediaan infrastruktur perhentian dan pejalan kaki yang memadai berkontribusi nyata terhadap peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, termasuk pelajar sebagai kelompok pengguna yang rentan [3], [10].

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut :
Tingkat kesesuaian fasilitas Halte SMPN 5 Karawang terhadap SPM SK Dirjen No. 271/HK.105/DRJD/96 sangat rendah. Dari 10 fasilitas yang dikaji, hanya 1 (Identitas Halte) yang memenuhi standar. Total persentase pemenuhan hanya 10%. Dari 6 fasilitas utama (wajib), tingkat kesesuaian hanya 16,7%. Tidak ada sama sekali terkaitdengan papan informasi trayek, lampu penerangan, tempat duduk, dan kanopi ada namun kondisi buruk. Seluruh fasilitas tambahan tidak tersedia (0% pemenuhan).Rekomendasi strategis mencakup: renovasi menyeluruh struktur dan fasilitas halte; penambahan papan informasi trayek; pengadaan lampu penerangan LED; pengadaan tempat sampah dan pagar pembatas; peningkatan aksesibilitas difabel (ramp, guiding block, handrail); serta program pemeliharaan rutin dan berkala. Pembangunan halte di dekat sekolah juga merupakan wujud pemenuhan hak anak atas rasa aman dalam perjalanan menuju dan dari tempat belajarnya, sekaligus bagian dari kewajiban penyelenggara jalan dalam menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai di kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi seperti zona sekolah.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13209
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Referensi

[1] Wibisono, R. E., & Putri, R. F. 2022. Evaluasi Kualitas Pelayanan Halte Terminal Purabaya pada Transportasi Umum Suroboyo Bus. Ge-STRAM: Jurnal Perencanaan dan Rekayasa Sipil, 5(2), 72-78. https://doi.org/10.25139/jprs.v5i2.4636
[2] Salsaqilah, A. P., Rahmawati, A. P., & Sudarismani, I. 2023. Kajian Kenyamanan Halte Satria Tangerang Berdasarkan Kebutuhan Pengguna. Jurnal Vastukara: Jurnal Desain Interior, Budaya, dan Lingkungan Terbangun, 3(2), 245-252. https://doi.org/10.59997/vastukara.v3i2.2730
[3] Nursasi, H., & Yenita, Y. 2023. Pengaruh Kualitas Layanan Angkutan Umum Transjakarta terhadap Persepsi Penumpang terkait Aksesibilitas dan Keselamatan Perjalanan (Rute Cibubur-BKN). Warta Penelitian Perhubungan, 35(1).
[4] Rachmadyaningrum, R., Hariani, D., & Herawati, A. R. 2022. Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Transjakarta pada Masa Pandemi. Journal of Public Policy and Management Review, 11(2).
[5] Kurniati, N. L. W. R. 2021. Dampak Ekonomi Pengoperasian Transjakarta Ditinjau dari Persepsi Pengguna. Jurnal Penelitian Transportasi Darat, 22(2).
[6] Forino, B. D., & Putranto, L. S. 2023. Persepsi Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek terhadap Integrasi Tarif PT JakLingko Indonesia. JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 5(1), 71-84.
[7] Saleh, Y., Meutia, W., & Anggraini, K. 2024. Evaluasi Kinerja Operasional Angkutan Kota Mikrotrans Jak Lingko. Jurnal ARTESIS, 4(1), 34-39.
[8] Setiawan, Y. 2023. Evaluasi Fasilitas Penyeberangan Jalan di Ruas Jalan Jenderal Sudirman Sokaraja Kabupaten Banyumas. Jurnal ISMETEK, 15(1), 18.
[9] Utama, R. I., & Momon, M. 2021. Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Kabupaten Agam. Cived, 8(3).
[10] Priyono, A., & Pradoto, W. 2021. Analisis Faktor-Faktor Pengembangan Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Trotoar di Kota Purwodadi (Studi Kasus: Koridor Jalan R. Suprapto). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(4), 360-371. https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.35234
[11] Ikhsan, A. M., Soesanto, E., & Septian, B. 2024. Implementasi Standar Transportasi dalam Pelayanan Angkutan Umum di Trans Jakarta yang Berbasis kepada UUD 1945. Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi, 6, 244-253.
[12] Dio, N. S. S., Simangunsong, J. E., & Haryanto, B. 2022. Evaluasi Kinerja Operasional pada Trayek B Kota Samarinda. Jurnal Teknologi Sipil.
[13] Nabila, E. F. D., & Putro, H. 2025. Evaluasi Kinerja Pelayanan Trans Jateng Koridor VI Semarang-Grobogan. Techno, 26(2), 117-126. https://doi.org/10.30595/techno.v26i2.26092
[14] Purnomo, M. T., & Herijanto, W. 2021. Evaluasi Kinerja Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Rute Semarang-Kendal. Jurnal Teknik ITS, 10(2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.63585
[15] Laila, N. I., Martini, R., & Astuti, P. 2023. Analisis Kinerja Pelayanan BRT Kota Semarang Melalui Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023. Journal of Politic and Government Studies, 13(3), 47-61.
[16] Hidayat, D. W., Oktopianto, Y., Ahmad, R., & Anindita, R. Y. 2022. Evaluasi Kinerja dan Jumlah Armada Angkutan Umum pada Terminal Ubung Denpasar Utara Studi Kasus Trayek Terminal Ubung-Matahari Terbit. Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety), 9(2), 131-141. https://doi.org/10.46447/ktj.v9i2.447

.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13209
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)